

**PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN,  
*FISCAL STRESS* DAN SISA ANGGARAN  
TERHADAP SERAPAN ANGGARAN  
PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA  
DI SUMUT**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
HASHFI LUTHFILHADI  
178330166**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

**PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN,  
*FISCAL STRESS* DAN SISA ANGGARAN  
TERHADAP SERAPAN ANGGARAN  
PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA  
DI SUMUT**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
HASHFI LUTHFILHADI  
178330166**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

**PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN,  
*FISCAL STRESS* DAN SISA ANGGARAN  
TERHADAP SERAPAN ANGGARAN  
PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA  
DI SUMUT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, *Fiscal Stress* dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumut

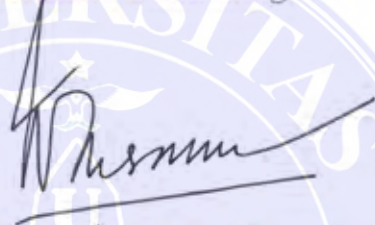
Nama : **HASHFI LUTHFILHADI**

NPM : 17 833 0166

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing



(Warsani Purnama Sari, SE., Ak., MM)

Pembimbing

Mengetahui :



(Ahmad Iqbal, CIMA (Hons.), MMgt., Ph.D., CIMA)  
Dekan



(Rana Fathinah Ananda, SE., M.Si)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 31/Januari/2022

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, *Fiscal Stress* Dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut”** yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Hashfi Luthfilhadi**

**NPM 17.833.0166**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hashfi Luthfilhadi  
NPM : 178330166  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ( *Non-Exclusive Royalty Free-Reight* )** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, *Fiscal Stress* Dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumut**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Medan Area menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database ), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

Yang Menyatakan



**Hashfi Luthfilhadi**

**NPM 17.833.0166**

## ABSTRACT

*The study is intended to determine whether the time penetapan budget , fiscal stress , the rest of the budget impact is partial and simultaneously to the uptake of the budget in the government district / city in North Sumatra . Variable independen are used in research this is the time of the determination of the budget , fiscal stress , residual budget while the dependent variable in this study is budget absorption . Which becomes populations in research this is the whole district / city in North Sumatra as many as 33 in the period 2015-2018. In this study , the researcher used the population as the research sample , namely all regencies /cities in North Sumatra as many as 33. The type of data used in this study is quantitative . The source of data used in this research is secondary data . Mechanical analysis of the data used is analysis of regression linear multiple by testing the hypothesis using SPSS. Results of the study showed that in the partial time of the determination of the budget (X1 ) does not influence significantly to the uptake of the budget , while fiscal stress (X2) influential significantly towards uptake budget and the rest of the budget (X3) influence significantly toward ser apan budget . In simultaneous time determination of the budget , fiscal stress , the rest of the budget impact positively and significantly to the uptake of the budget . Rated R 2 shows the results of 0.205 or 20.5% which indicates that the variable time of the determination of the budget , fiscal stress and the rest of the budget affect the uptake budget amounted to 20.5% and the rest of 79.5% is influenced by variables other outside research this .*

**Keywords : Time Determination of the Budget , Fiscal Stress , Rest Of The Budget And Budget Absorption**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah waktu penetapan anggaran, *fiscal stress*, sisa anggaran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah waktu penetapan anggaran, *fiscal stress*, sisa anggaran sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah serapan anggaran. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumut sebanyak 33 dengan periode 2015-2018. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi sebagai sampel penelitian yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Sumut sebanyak 33. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial waktu penetapan anggaran ( X1 ) tidak berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran, sedangkan *fiscal stress* ( X2 ) berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran dan sisa anggaran ( X3 ) berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran. Secara simultan waktu penetapan anggaran, *fiscal stress*, sisa anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Nilai R<sup>2</sup> menunjukkan hasil sebesar 0,205 atau 20,5% dimana menunjukkan bahwa variabel waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran mempengaruhi serapan anggaran sebesar 20,5% dan sisanya sebesar 79,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**Kata Kunci : Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress, Sisa Anggaran Dan Serapan Anggaran**



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan pada tanggal 05 Desember 1996 dari Ayah Amiruddin dan Ibu Tenti Kesuma. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Tahun 2014 peneliti lulus dari SMA Negeri 6 Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman amaliyah seperti saat sekarang ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress Dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumut**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata (S-1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

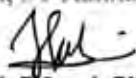
Dalam penulisan skripsi ini ditemui beberapa kesulitan, namun dengan kerja keras, kesabaran, usaha, motivasi serta bantuan dari beberapa pihak baik secara moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Banyak pelajaran berharga yang menjadi inspirasi bagi penulis selama melakukan penelitian ini. Peneliti banyak belajar mengenai arti dari selama kita bekerja keras, terus belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti Bapak Amiruddin dan Ibu Tenti Kesuma, serta adik-adik saya Rifda Rihadatul Aisy dan Waliid Adhim Alhadi.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Warsani Purnama Sari, S.E, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Linda Lores, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Habibie S.E, M.Ak selaku Dosen Sekretaris Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Universitas Medan Area yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2017 dan teman-teman yang telah memberikan saya motivasi, semangat serta saran dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 31 Januari 2022

  
**Hashfi Luthfilhadi**  
NPM: 178330166

## DAFTAR ISI

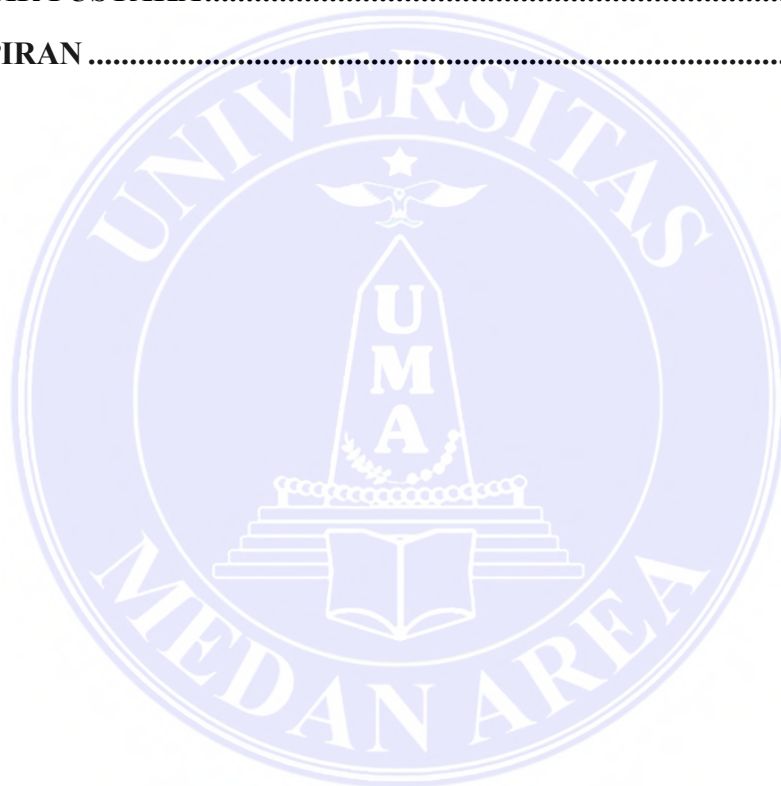
	Halaman
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Waktu Penetapan Anggaran .....	7
2.1.1 Pengertian Waktu Penetapan Anggaran .....	7
2.1.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Waktu Penetapan Anggaran.....	8
2.1.3 Indikator Waktu Penetapan Anggaran .....	10
2.2 <i>Fiscal Stress</i> .....	11
2.2.1 Pengertian <i>Fiscal Stress</i> .....	11
2.2.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan <i>Fiscal Stress</i> .....	12
2.2.3 Indikator <i>Fiscal Stress</i> .....	13
2.3 Sisa Anggaran.....	13
2.3.1 Pengertian Sisa Anggaran .....	13
2.3.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Sisa Anggaran .....	14
2.3.3 Indikator Sisa Anggaran .....	16
2.4 Serapan Anggaran.....	16
2.4.1 Pengertian Serapan Anggaran .....	16
2.4.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Serapan Anggaran .....	17
2.4.4 Indikator Serapan Anggaran .....	18
2.5 Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, <i>Fiscal Stress</i> dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran .....	18
2.5.1 Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran .....	19
2.5.2 Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Serapan Anggaran.....	20
2.5.3 Pengaruh Sisa Anggaran Terhadap	



Serapan Anggaran .....	21
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	22
2.7 Kerangka Konseptual.....	24
2.8 Hipotesis Penelilitan .....	26
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	27
3.1.1 Jenis Penelitian .....	27
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	27
3.1.3 Waktu Penelitian .....	28
3.2 Populasi Dan Sampel .....	29
3.2.1 Populasi.....	29
3.2.2 Sampel .....	29
3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	29
3.3.1 Variabel Dependen .....	30
3.3.2 Variabel Independen.....	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Jenis Data .....	31
3.4.2 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Teknik Analisa Data .....	32
3.6.1 Uji Normalitas .....	32
3.6.2 Uji Multikolonieritas .....	33
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas .....	33
3.6.4 Uji Autokorelasi .....	34
3.6.5 Pengujian Hipotesis .....	34
3.6.6 Uji Parsial ( Uji t ) .....	35
3.6.7 Uji Simultan ( Uji F ).....	35
3.6.8 Koefisen Determinasi ( $R^2$ ) .....	36
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	37
4.2 Hasil Analisis Data .....	37
4.2.1 Waktu Penetapan Anggaran.....	38
4.2.2 <i>Fiscal Stress</i> .....	39
4.2.3 Sisa Anggaran.....	40
4.2.4 Serapan Anggaran.....	41
4.3 Hasil Penelitian.....	43
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.3.1.1 Uji Normalitas.....	43
4.3.1.2 Uji Multikolonieritas .....	46
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....	48
4.3.1.4 Uji Autokorelasi.....	49
4.3.2 Uji Regresi Linier Berganda.....	50
4.3.3 Uji Hipotesis.....	51
4.3.3.1 Uji Parsial ( Uji t ).....	51
4.3.3.2 Uji Simultan ( Uji F ) .....	53



4.3.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
4.4.1 Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran .....	54
4.4.2 Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Serapan Anggaran .....	55
4.4.3 Pengaruh Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran .....	56
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Waktu Penetapan Anggaran.....	38
Tabel 4.2 Perhitungan <i>Fiscal Stress</i> .....	39
Tabel 4.3 Perhitungan Sisa Anggaran.....	40
Tabel 4.4 Perhitungan Serapan Anggaran.....	42
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Residual .....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas .....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Berganda .....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial ( Uji t ).....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan ( Uji F ).....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	54

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 4.1 Grafik P-Plot.....	45
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	46
Gambar 4.3 Grafik Scatter Plot .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Data Mentah -----	62
Teknik Analisis Data-----	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengelola keuangan daerah adalah mengelola anggaran. Anggaran merupakan landasan yang digunakan sebagai pengeluaran dan pemasukan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan setiap tahunnya. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun keuangan tahunan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). Anggaran belanja pemerintah yang telah disahkan diharapkan dapat diserap dengan baik oleh pemerintah daerah. Implementasi anggaran pendapatan dan belanja daerah harus digunakan secara efektif dan efisien.

Serapan anggaran adalah pengeluaran keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah direncanakan dalam periode waktu anggaran. Periode waktu anggaran pemerintah biasanya satu tahun berjalan, jadi pemerintah sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan dalam satu tahun berjalan. Serapan anggaran dalam pemerintahan merupakan pengeluaran keuangan daerah yang digunakan untuk melaksanakan setiap kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun berjalan dan sudah disahkan pihak legislatif.

Serapan anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti yang telah diungkapkan oleh ( Fuad Ahmad Kabiro, keuangan setda provsu ) pada tahun 2014-2015, realisasi APBD secara fisik mencapai 89,80%. Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada periode



yang sama di tahun 2015 sebesar 93,82% ( Cut dan Iskandar, 2017 ). Semenjak berlangsungnya era otonomi daerah hingga sekarang, fenomena minimnya serapan APBD di sebagian besar wilayah di Indonesia, ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota semakin menggejala. Pemerintah dituntut mengelola keuangan secara bertanggung jawab agar dapat terwujud keuangan daerah yang akuntabel, efisien dan transparan.

Serapan anggaran merupakan topik yang sering dibicarakan dikalangan pengamat ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ). Alokasi anggaran yang efisien, dapat membantu negara mendanai kegiatan strategis negara. Pemerintah harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih penting sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kegagalan penyerapan anggaran dapat mengakibatkan *idle money* yang artinya kegagalan target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Serapan anggaran yang gagal memenuhi target, berarti telah terjadi *inefisiensi* dan *inefektivitas* pengalokasian anggaran ( BPKP, 2011 ).

Menilai penyerapan anggaran, dapat dilihat dari target penyerapan anggaran yang telah disusun diawal, apakah sudah sesuai atau belum. Dan ukuran kinerja dengan melihat *output* dan *outcome*. Serapan anggaran yang lebih tinggi tanpa adanya output dan outcome yang maksimal maka akan menunjukkan kinerja yang kurang baik ( BPKP, 2011 ).

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengawasan. Oleh karena itu, melakukan perencanaan dengan baik adalah tugas dari pemerintah agar dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi dalam

menyelenggarakan kegiatan wajib yang menyentuh masyarakat luas. Karena perencanaan yang kurang baik dapat mengakibatkan lemahnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Padahal pelayanan yang baik terhadap masyarakat merupakan tugas wajib bagi pemerintah daerah. Serapan anggaran yang baik harus mengindikasikan target yang akan dicapai pemerintah.

Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah menarik perhatian beberapa peneliti untuk meneliti hal tersebut. Diantaranya yang dilakukan oleh Ruhmaini, Syukriy Abdullah dan Zuraida ( 2017 ), yang melakukan penelitian pada pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah, menyatakan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran belanja langsung di Kabupaten Aceh Tengah dengan arah negatif. Artinya, semakin besar sisa anggaran tahun sebelumnya menyebabkan turunnya penyerapan anggaran di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini tidak sejalan dengan, penelitian yang dilakukan Ardhini ( 2011 ) yang menyatakan sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Imam Hanif dan Suparno ( 2017 ), yang melakukan penelitian pada Kab/Kota di provinsi Aceh, menyatakan bahwa waktu penetapan anggaran berpengaruh pada penyerapan anggaran pemerintah. Artinya bahwa setiap penetapan anggaran pemerintah baik itu secara terlambat ataupun tidak terlambat berpengaruh pada penyerapan anggaran pemerintah. Pada penelitian ini *fiscal stress* juga berpengaruh pada penyerapan anggaran di Kab/Kota provinsi Aceh. Artinya semakin tinggi

*fiscal stress* yang di alami pemerintah daerah maka semakin kecil nilai penyerapan anggaran di daerah tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nofa Sapitri Rezeki ( 2017 ), yang melakukan penelitian di pemerintah Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran di Kota Pekanbaru setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menganggarkan dana sisa lebih perhitungan anggaran untuk program atau kegiatan di tahun yang akan datang. Dana sisa lebih perhitungan dibiarkan mengendap di kas daerah. Penetapan APBD di Kota Pekanbaru juga mengalami keterlambatan. Hal ini membuat waktu pelaksanaan menjadi terlambat. Pekanbaru lambat dalam proses perencanaan, pembahasan dan pengesahan. APBD yang terlambat ditetapkan akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum APBD.

Berdasarkan fenomena penyerapan anggaran pemerintah daerah khususnya yang terjadi di Indonesia. Peneliti tertarik melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sehingga tertarik melakukan penelitian dengan judul. **Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress, dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut ?

2. Apakah *fiscal stress* berpengaruh terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut ?
3. Apakah sisa anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut ?
4. Apakah waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran berpengaruh secara simultan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh waktu penetapan anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.
2. Untuk mengetahui pengaruh *fiscal stress* terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.
3. Untuk mengetahui pengaruh sisa anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.
4. Untuk mengetahui pengaruh waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

## **2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan anggaran sehingga dapat memaksimalkan penyerapan anggaran.

## **3. Bagi Akademisi**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi kepada peneliti lainnya yang ingin mengembangkan dan tertarik melakukan penelitian terhadap serapan anggaran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Waktu Penetapan Anggaran

##### 2.1.1 Pengertian Waktu Penetapan Anggaran

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, waktu penerapan anggaran merupakan susunan setiap rencana kerja dan anggaran selama satu tahun kedepan yang berpedoman kepada Renja ( Rencana Kerja ). Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah disusun diberikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah ( RAPBD ) yang akan disahkan menjadi APBD. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu yang telah ditetapkan untuk penetapan APBD paling lambat bulan November, atau satu bulan setelah penetapan APBN.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan daerah Kementerian dalam Negeri, menyatakan waktu penetapan anggaran merupakan penetapan APBD yang dilakukan agar program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar ( Surbakti, 2019 ).

Waktu Penetapan anggaran merupakan pengesahan APBD yang akan mempengaruhi kinerja dari SKPD karena waktu yang digunakan tidak sesuai dengan satu tahun berjalan anggaran. Abdullah dan Darma ( 2015 ) menyatakan keterlambatan penetapan anggaran akan menyebabkan proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan juga akan terlambat sehingga, akan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara tuntas sampai akhir periode anggaran atau bahkan sebagian harus dibatalkan karena tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat.

### 2.1.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Waktu Penetapan Anggaran

#### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency teori*) yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hal ini masyarakat berada di posisi pemilik dan pemerintah daerah berada di posisi manajemen. Oleh sebab itu masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang bertindak sebahai manajemen juga memiliki wewenang dalam mengatur anggaran agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Teori keagenan (*agency theory*) dikemukakan oleh Jensen dan Mackling ( 1976 ) adalah sebuah hubungan kontraktual antara manajer ( *agent* ) dan pemilik ( *principal* ). Agar hubungan ini dapat berjalan secara konseptual maka pemilik memberikan kekuasaan penuh atas pemberian keputusan kepada manajer. Untuk menjalankan layanan sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang mencakup pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen ( Eko Raharjo, 2007 ). Dalam praktiknya terdapat perspektif yang

mengindikasikan teori keagenan dalam menjalankan pemerintahan yaitu hubungan antara masyarakat dengan pihak legeslatif dan, juga hubungan antara legislatif dengan eksekutif.

Hubungan teori keagenan dengan waktu penetapan anggaran karena dalam konteks menjalankan hubungan kenegaraan penyusunan anggaran dilakukan oleh pihak eksekutif yang bertindak sebagai *agent* yang bertugas menyusun anggaran selama satu tahun berjalan. Pihak legislatif bertindak sebagai *prinsipal* yang bertugas mengawasi, menerima, dan menolak anggaran yang telah disusun. Pihak legislatif melakukan hal ini karena dilatarbelakangi oleh kepentingan dari muatan anggaran tersebut.

Anggaran yang diajukan pihak eksekutif memiliki kepentingan untuk memperbesar agensinya, dalam hal finansial maupun non finansial. Pihak legislatif juga mempergunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan waktu pengesahan anggaran terlambat.

## 2. Teori Stewardship

Teori stewardship yaitu teori yang menjelaskan situasi dimana pihak manajemen bertindak sebagai steward yang bertindak sesuai keinginan pemilik ( Donaldson & Davis, 1989, 1991 ). Dalam teori stewardship manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward berbeda dengan pemilik, maka steward memilih bekerja sama dan berusaha berperilaku sesuai ketentuan pemilik. Karena tujuan steward dalam hal ini bukan kepentingan pribadi melainkan kepentingan organisasi. Teori steward

mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik ( Eko Raharjo, 2007 ).

Hubungan teori stewardship dengan waktu penetapan anggaran karena penyusunan anggaran merupakan tugas dari steward dalam konsep teori ini maka, susunan anggaran harus berusaha sesuai dengan ketentuan pemilik anggaran. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan pendapat dikarenakan pihak eksekutif yang bertindak sebagai steward pada teori ini juga harus menyesuaikan kepentingan demi memperbesar instansi secara finansial atau nonfinansial. Manajemen sebagai pihak pemberi keputusan dalam teori ini yaitu DPRD sebagai wakil dari pemilik anggaran dan juga harus menyesuaikan anggaran yang disusun, agar dapat mencukupi dari muatan anggaran yang tersedia. Hal ini menyebabkan butuhnya waktu untuk membahas anggaran, sehingga dapat terjadi waktu penetapan anggaran yang terlambat.

### **2.1.3 Indikator Waktu Penetapan Anggaran**

Penelitian ini menggunakan indikator yang pernah digunakan pada jurnal Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Dan *Fiscal Stress* Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ( Hanif dan Suparno, 2017 ) yaitu dengan menggunakan skala nominal. Parameter pengukuran penelitian dengan memberikan nilai satu untuk waktu penetapan anggaran yang tidak terlambat dan nol untuk waktu penetapan anggaran yang terlambat. Definisi operasional yang digunakan berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu bulan November atau 1 bulan setelah penetapan APBN.

## 2.2 *Fiscal Stress*

### 2.2.1 Pengertian *Fiscal Stress*

*Fiscal stress* merupakan tekanan anggaran ( fiskal ) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyerlenggaraan pelayanan publik, dimana tekanan keuangan ( *fiscal stress* ) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian demi meningkatkan penerimaan demi membiayai pengeluaran yang ada ( Ardhini, 2011 ). Tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan untuk melaksanai pembiayaan pembangunan didaerahnya sendiri dapat dikategorikan mengalami *fiscal stress*.

Junita ( 2016 ) mengatakan tekanan fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya. Pengambilan keputusan pengalokasian anggaran yang ketat antara legialatif dan eksekutif merupakan suatu bentuk dari kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya sendiri. Abdullah Nazry ( 2014 ) mengatakan *fiscal stress* merupakan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan yang menyebabkan indikasi tekanan fiskal pada pemerintahan daerah. . Struktur yang kurang baik membuat pemerintah daerah mencari sumber pendanaan diluar pendapatan daerahnya mendorong pemerintah tidak cermat dalam melakukan penganggarannya.

Kurniawan dan Indra ( 2019 ), menyatakan *fiscal stress* merupakan tekanan fiskal ( keuangan ) yang terjadi ketika penerimaan ( pendapatan ) tidak mampu menutupi pengeluaran ( belanja ) yang dilakukan daerah. Havesi ( 2006 ), menyatakan bahwa *fiscal stress* merupakan penilaian kepada kondisi



keuangan yang pada umumnya masyarakat mengalami keterbatasan terhadap biaya operasi, dan mengalami masalah pertumbuhan anggaran.

### 2.2.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan *Fiscal Stress*

#### 1. Teori Keagenan

Hubungan *fiscal stress* dengan teori keagenan karena dalam konteks menjalankan pemerintahan pihak eksekutif bertindak sebagai *agen*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai *principal*. Pihak eksekutif yang bertindak sebagai *agent* bertugas memberikan pelayanan terhadap pemilik anggaran yaitu masyarakat yang bertindak sebagai *principal*. Kegiatan yang akan dilakukan oleh *agent* sudah tersusun sebagai anggaran selama satu tahun berjalan.

Anggaran yang telah disusun selama satu tahun kedepan selain digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap *principal*, juga digunakan untuk memperbesar agensinya baik secara finansial maupun nonfinansial. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pelayanan terhadap *principal*, dikarenakan *agent* yang tidak dapat memperbesar agensinya secara finansial maupun nonfinansial. Permintaan pelayanan *principal* yang terus meningkat, sedangkan *agent* tidak dapat memenuhinya maka akan terjadi *fiscal stress*.

#### 2. Teori Stewardship

Teori stewardship menyatakan bahwa dimana pihak manajemen bertindak sesuai keinginan pemilik. Dalam konteks ini pihak manajemen adalah pihak eksekutif. Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan selama satu tahun berjalan pihak eksekutif memiliki tugas menjadi pelayan bagi pemilik anggaran tersebut yaitu masyarakat. Karena dalam pelaksanaan anggaran satu tahun berjalan banyak pelayanan yang melebihi muatan anggaran, sehingga pihak

eksekutif sebagai steward dalam teori ini harus menggunakan kemampuannya sendiri agar tetap dapat mencapai keinginan pihak manajemen. Hal ini menyebabkan *fiscal stress* bagi pihak eksekutif dimana pihak eksekutif harus membiayai setiap kegiatan dengan kemampuan sendiri.

### 2.2.3 Indikator *Fiscal Stress*

Penelitian ini menggunakan indikator yang pernah digunakan pada jurnal Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Dan *Fiscal Stress* Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ( Hanif dan Suparno, 2017 ), yaitu dengan menggunakan skala rasio. Tekanan anggaran fiskal yang terjadi sebagai akibat dari keterbatasan penerimaan daerah yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Parameter pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\frac{\Sigma \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\Sigma \text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## 2.3 Sisa Anggaran

### 2.3.1 Pengertian Sisa Anggaran

Menurut Syukriy ( 2013 ) sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan suatu sumber penerimaan internal yang digunakan untuk mendanai kegiatan di tahun berjalan. SILPA biasanya digunakan untuk melanjutkan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya dan membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni. Besaran nilai sisa anggaran tahun

sebelumnya dapat diketahui secara pasti setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya di sahkan.

Sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah disebut sisa lebih pembiayaan anggaran ( SILPA ). Sisa anggaran yang belum terpakai maka akan terbawa ke anggaran tahun berikutnya. Sisa anggaran digunakan sebagai pembiayaan untuk menutupi defisit pembiayaan apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja.

Sisa anggaran merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ( belanja ) anggaran selama satu periode anggaran. Besaran sisa anggaran tahun sebelumnya masih berupa ramalan dikarenakan penetapan anggaran untuk tahun sekarang dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan periode anggaran tahun sebelumnya selesai ( Kurniawan dan Indra, 2019 ).

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 menyatakan sisa anggaran merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Nellyanti, Darwanis dan Abdullah ( 2016 ) menyatakan sisa lebih perhitungan anggaran merupakan penerimaan awal tahun berjalan yang berasal dari penerimaan sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya yang menjadi objek untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan.

### **2.3.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Sisa Anggaran**

#### **1. Teori Keagenan**

Salah satu dampak dari penerapan teori keagenan adalah perilaku oportunistik yang terjadi karena pihak agensi lebih memiliki banyak informasi dari pada pihak prinsipal. Pihak eksekutif akan mengusulkan anggaran yang

lebih besar dari yang aktual saat ini. Namun sebaliknya pihak eksekutif akan mengusulkan pendapatan yang lebih kecil dikarenakan agar dapat mencapai target dengan mudah. Usulan anggaran tersebut menyebabkan kesenjangan tersebut merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi karena pihak eksekutif ingin posisi yang aman dalam menjalankan pekerjaan dan fungsinya. Kesenjangan anggaran ini menyebabkan adanya sisa anggaran pada akhir tahun.

Sisa anggaran pada akhir tahun yang secara operasional lebih banyak informasinya diketahui oleh *agent* harus dicatat dilaporan tahunan pemerintah daerah setiap tahunnya. Sisa anggaran yang ada selama satu tahun anggaran berjalan dipakai di tahun berikutnya untuk melaksanakan kegiatan *agent* dan memberikan pelayanan terhadap *prinsipal* yang pada tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

## 2. Teori Stewardship

Pihak manajemen yang bertindak sebagai *steward* pada konteks teori ini adalah pihak eksekutif. *Steward* harus bertindak sesuai keinginan pemilik. Anggaran yang sudah direncanakan selama satu tahun berjalan direncanakan dan disiapkan untuk kegiatan yang memberi kepuasan kepada pemilik anggaran. Sisa anggaran yang ada pada tahun berjalan digunakan *steward* untuk memberikan pelayanan terhadap pemilik anggaran pada tahun berikutnya. Sisa anggaran pada tahun berjalan digunakan pihak eksekutif untuk melakukan kegiatan yang mungkin belum dilakukan selama satu tahun berjalan, atau melakukan kegiatan yang memberikan pelayanan lebih kepada pemilik anggaran pada tahun berikutnya.

### 2.3.3 Indikator Sisa Anggaran

Penelitian ini menggunakan indikator yang pernah digunakan pada penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ( Rambe, 2018 ) yaitu dengan menggunakan skala rasio. Parameter yang digunakan merupakan sisa anggaran tahun lalu yang terdapat dalam APBD tahun berjalan.

$$\frac{\Sigma \text{Realisasi SILPA}}{\Sigma \text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\Sigma \text{Total Pendapatan Daerah}$$

## 2.4 Serapan Anggaran

### 2.4.1 Pengertian Serapan Anggaran

Serapan anggaran merupakan suatu bentuk pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target yang sudah direncanakan dalam bentuk finansial. Siklus penyerapan anggaran terdiri atas perencanaan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, penetapan anggaran yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengesahan anggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ). Serapan anggaran mulai berjalan ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).

Serapan anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan dan mempertanggungjawabkan setiap akumulasi kegiatan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah ( Dadan dan Indi, 2017 ). Menurut Halim ( 2014;18 ), serapan anggaran merupakan pencapaian dari suatu estimasi



yang hendak dicapai selama suatu periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu ( realisasi anggaran ), karena yang diamati adalah entitas pemerintah maka serapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam laporan realisasi anggaran pada saat tertentu.

Serapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan pasal 4 ayat 2 yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian pengeluaran ( Elypaz, Herman dan Winston, 2017 ).

#### 2.4.2 Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan Serapan Anggaran

##### 1. Teori Keagenan

Serapan anggaran dalam perspektif teori keagenan muncul ketika *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan memberikan wewenang keputusan kepada *agent* tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang ( *agent* ) dengan *principal*. Teori ini merupakan salah satu yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen pada organisasi sektor publik dengan konsep masyarakat sebagai *principal* dan pihak eksekutif sebagai *agent*. Teori keagenan mendukung

pelaksanaan kegiatan anggaran terhadap serapan anggaran, karena kegiatan anggaran yang sudah direncanakan diberikan kepada *principal*.

## 2. Teori *Goal Setting*

*Goal setting* teori dikemukakan oleh Locke ( 1968 ) merupakan salah satu bentuk teori motivasi. Konsep dasarnya seseorang mampu memahami tujuan yang diharapkan organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kinerjanya. Teori ini menyatakan bahwa karyawan memiliki komitmen tujuan tinggi akan mempengaruhi kinerja manajerial untuk memenuhi sasaran serapan anggaran. Semakin tinggi komitmen yang dilakukan pihak eksekutif terhadap tujuannya, maka akan mendorong pihak eksekutif untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam memenuhi serapan anggaran.

### 2.4.3 Indikator Serapan Anggaran

Penelitian ini menggunakan indikator yang pernah digunakan pada penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ( Rambe, 2018 ) yaitu dengan menggunakan skala rasio. Parameter yang digunakan merupakan realisasi belanja pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran.

$$\frac{\Sigma \text{Realisasi Anggaran}}{\Sigma \text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\Sigma \text{Anggaran Belanja}$$

## 2.5 Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, *Fiscal Stress* Dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran

### 2.5.1 Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran

Waktu penetapan anggaran diputuskan bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ). Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, waktu penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ) paling lambat satu bulan setelah anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ) ditetapkan yaitu bulan November. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memikirkan perencanaan teknis untuk kinerja di tahun yang akan datang.

Fenomena yang terjadi masih banyak daerah yang belum mampu menyusun anggaran berdasarkan waktu yang ditetapkan. Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa masih ada beberapa daerah yang terlambat menyusun anggaran berdasarkan waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan keuangan di Indonesia, karena salah satu indikator pengukuran kinerja keuangan menurut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Keterlambatan waktu penetapan anggaran menyebabkan banyaknya kegiatan dan proses administrasi yang terlambat. Pengadaan barang dan jasa terlambat sehingga penandatanganan kontrak dengan supplier dan pihak ketiga ( kontraktor ) menjadi terlambat, sementara batas waktu penyelesaian proyek tidak dapat diundur. Sehingga banyak proyek pemerintah yang batal karena tidak dapat selesai sesuai dengan waktu satu tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Hanif dan Suparno ( 2017 ) di Kab/Kota di Provinsi Aceh menyatakan bahwa Pemerintah masih belum

mampu memanfaatkan waktu penetapan anggaran untuk memaksimalkan kinerja serapan anggaran.

### 2.5.2 Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap Serapan Anggaran

Menurut Undang-Undang no 34 tahun 2000 yang mengatasi pemungutan pajak daerah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Keuangan daerah menjadi tidak stabil terutama dibidang pendapatan dalam memasuki otonomi daerah ini. Daerah-daerah yang tidak siap akan mengalami *fiscal stress* dikarenakan pendapatan daerah yang berkurang sehingga daerah harus membiayai penyelenggaraan kegiatan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Beberapa daerah beruntung dikarenakan memiliki potensi dalam menerima pendapatan daerah yang optimal yang berasal dari pajak retribusi daerah dan sumber daya alam yang memadai. Namun disisi lain menurut beberapa daerah menjadi masalah dikarenakan harus meningkatkan kemandirian daerah. Hal ini menyebabkan daerah harus mengoptimalkan serapan anggaran dan pendapatan daerah selama satu tahun berjalan agar pelayanan terhadap publik berjalan dengan baik. Dapat diasumsikan bahwa *fiscal stress* mempengaruhi serapan anggaran. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Hanif dan Suparno ( 2017 ) yang melakukan penelitian di Kab/Kota Aceh menyatakan bahwa tekanan fiskal yang tinggi mencerminkan kebutuhan belanja daerah yang besar namun tidak mampu mengimbangi pendapatan daerah yang diterima. Hal ini berarti pemerintah daerah dengan kondisi *fiscal stress* yang

tinggi tersebut memiliki fleksibilitas yang rendah dalam menyesuaikan anggarannya sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja serapan anggaran.

### **2.5.3 Pengaruh Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran**

Pelampaun pendapatan dan penghematan belanja akan menghasilkan sisa dana pada APBD. Sisa dana ini disebut dengan sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ). Semakin besar SILPA menandakan adanya kekurangan cermatan penyerapan APBD dan menunjukkan kelemahan terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan anggaran selama satu tahun berjalan. Rasio SILPA terhadap anggaran terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Dapat diasumsikan sisa anggaran mempengaruhi serapan anggaran pada tahun berjalan.

Fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah saat ini setiap tahunnya sisa anggaran selalu terdapat di laporan keuangan. Meskipun mencerminkan ketidakakuratan, namun sisa anggaran berguna untuk membiayai proyek pemerintah pada tahun berjalan yang tidak dapat dibiayai oleh pendapatan pemerintah. Tetapi sisa anggaran menjadi beban kerja pemerintah, karena akan makin banyak pelaksanaan kegiatan kerja pada tahun anggaran berkenaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruhmaini, Syukriy Abdullah dan Zuraida ( 2017 ) melakukan penelitian SKPK di Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa semakin besar sisa anggaran tahun sebelumnya maka akan menyebabkan turunnya serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah. Besar kecilnya sisa anggaran suatu daerah ditentukan oleh kemampuan Pemerintah daerah dalam mengestimasi



pendapatan dan belanja dan kemampuan SKPK dalam menyelesaikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak selalu sisa anggaran yang berasal dari kegiatan yang telah selesai 100 % digambarkan sebagai efisiensi, tetapi bisa juga diartikan sebagai ukuran besarnya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh SKPK.

## 2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ruhmaini, Syukriy dan Zuraida ( 2017 ) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPK Di Kabupaten Aceh Tengah	Variabel Independen : besaran anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya dan perubahan anggaran  Variabel Dependen : serapan anggaran	Variabel independen yang di gunakan peneliti sama yaitu sisa anggaran tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap serapan anggaran sebelumnya	Variabel besaran anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah  Variabel

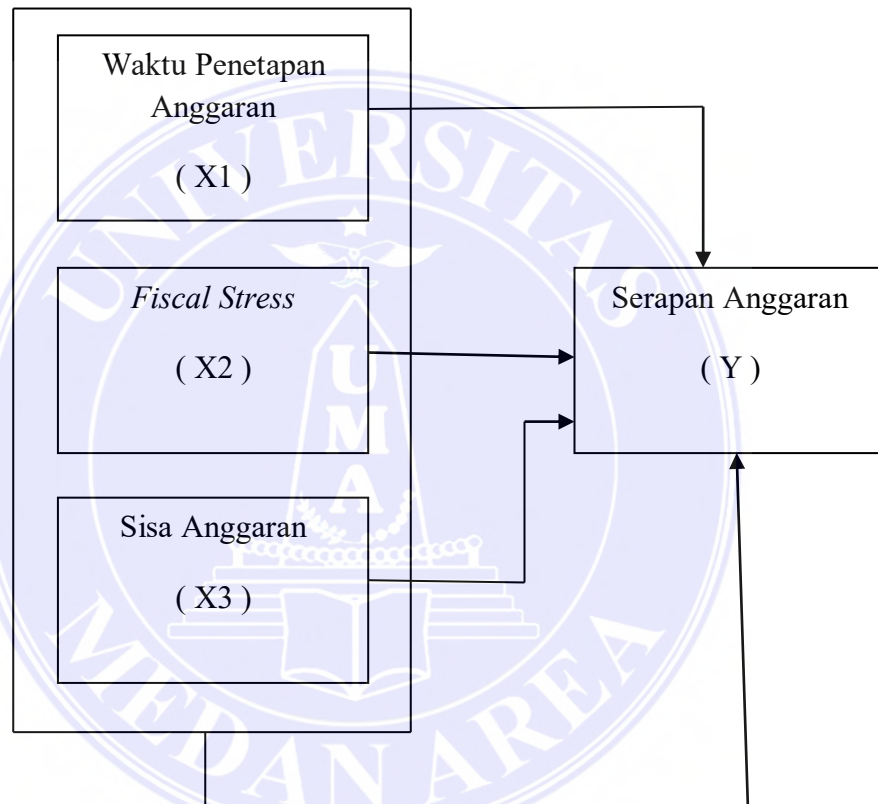
			belanja langsung SKPK di Kabupaten Aceh Tengah	perubahan Anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran Tempat penelitian yang dilakukan berbeda
2	Imam Hanif dan Suparno (2017) Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran dan <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh	Variabel Independen : waktu penetapan anggaran dan <i>fiscal stress</i> Variabel Dependen : Serapan Anggaran	Variabel Independen waktu penetapan anggaran dan <i>fiscal stress</i> berpengaruh pada serapan anggaran pemerintah di Kabupaten/Kota di Aceh	Penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel independen sisa anggaran sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan nya, tempat

				penelitian juga berbeda
3	Erlina, Ari Saputra dan Iskandar Muda ( 2017 ) The Analysis of The Influencing Factors Of Budget Absorption	Variabel Independen : waktu penetapan anggaran, surplus anggaran dan pendapatan asli daerah Variabel dependen : Serapan anggaran	Variabel waktu penetapan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran	secara parsial variabel waktu penetapan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, variabel surplus anggaran dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap serapan anggaran

## 2.7 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini kerangka konseptual yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori terdapat

faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yaitu waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut. Hubungan variabel independen dan dependen dapat digambarkan dengan kerangka sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Dari kerangka konseptual diatas diatas disimpulkan bahawa peneliti ingin meneliti pengaruh waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

## 2.8 Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau tuntutan sementara tentang beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai tuntutan sementara dalam penelitian untuk menguji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini dapat diasumsikan sebagai berikut :

$H_1$  = Waktu penetapan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

$H_2$  = *Fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

$H_3$  = Sisa anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

$H_4$  = Waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, ( Sugiyono 2013;7 ). Karena penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk mengukur dan mendapatkan hasil dari data dokumentasi.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 2015-2018. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan Kementerian Republik Indonesia ( <http://www.dpjk.kemenkeu.go.id> ). Data diambil berdasarkan keperluan dalam penelitian.

### 3.1.3 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Waktu Penelitian						
		2020	2021					
		Nov	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul	Sep
1	Pengajuan KPA							
2	Pengajuan Judul							
3	Pengusulan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengumpula n Data							
6	Pengolahan Data							
7	Seminar Hasil							
8	Sidang Meja Hijau							

## 3.2 Populasi Dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya ( Sugiyono 2013;80 ). Berdasarkan pengertian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumut yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota

### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ( Sugiyono 2013;81 ). Berdasarkan pengertian, sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumut yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, karena dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh populasi.

## 3.3 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono 2013;38 ). Penelitian ini menggunakan dua variabel operasional yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah serapan anggaran, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu penetapan anggaran, *fiscal stress*, sisa anggaran.

### 3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas ( Sugiyono 2013;39 ). Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel independen adalah sebagai berikut :

#### 1. Serapan Anggaran ( Y )

Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan-pembangunan yang ingin dicapai, dan kegiatan yang ingin dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Variabel ini diukur menggunakan skala Rasio.

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen ( Sugiyono 2018;39 ). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Waktu Penetapan Anggaran ( X<sub>1</sub> )

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa waktu penetapan APBD paling lambat bulan November atau satu bulan setelah APBN ditetapkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal.

#### 2. Fiscal Stress ( X<sub>2</sub> )

Tekanan anggaran ( fiskal ) yang terjadi sebagai akibat dari keterbatasan penerimaan daerah yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio.

### 3. Sisa Anggaran ( $X_3$ )

Sisa anggaran adalah besaran sisa anggaran tahun lalu yang terdapat dalam APBD tahun berjalan. Parameter pengukuran variabel ini menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio.

#### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

##### 3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang diukur dan dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia melalui situs resmi instansi ( <http://www.dpj.kemenkeu.go.id> ).

##### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data ( Sugiyono 2013;225 ). Sumber data yang dimaksud berupa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumut yang diposting di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia.

#### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Cara-cara pengumpulan memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, yaitu melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi



merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian ( Sugiyono 2013;240 ). Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia ( <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> ) yang dijadikan sampel dalam penelitian dan hasilnya akan dianalisis menggunakan analisis statistik.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat pengolah data yang bernama SPSS ( *Statistical Package For Social Science* ). Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda bertujuan untuk melihat secara langsung pengaruh dari variabel independen yaitu waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran terhadap variabel dependen yaitu serapan anggaran. Dalam melakukan penelitian regresi linier berganda menggunakan SPSS, terlebih dahulu harus menggunakan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti merupakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskidasitas dan uji autokorelasi.

#### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil ( Ghozali 2018;161 ). Pengujian normalitas yang digunakan adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov ( K-S ).

Kriteria pengambilan keputusan dari uji Kolmogrov-Smirnov ( K-S ) adalah :

1. Jika signifikan  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal
2. Jika signifikan  $\geq 0,05$  maka distribusi data normal

### 3.6.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas ( independen ). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol ( Ghozali 2018;107 ). Pada penelitian ini pengujian multikolonieritas menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* ( VIF ). Nilai yang umum dipakai dalam uji multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$ .

### 3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas* jika berbeda disebut *Heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *Homoskedastisitas* ( Ghozali 2018;137 ). Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatter plot*.

### 3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali 2018;112). Pada penelitian ini Cara yang digunakan peneliti untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*.

### 3.6.5 Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan untuk menguji signifikansi antara variabel dependen dan independen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai pengujian variabel dependen terhadap variabel independen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F, uji  $t$  dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Persamaan model regresi linier berganda pada penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

$Y$  = Serapan anggaran

$X_1$  = Waktu Penetapan Anggaran

$X_2$  = Fiscal Stress

$X_3$  = Sisa Anggaran

$a$  = Konstanta

$b$  = Koefisien

$\epsilon$  = Nilai Residual

### 3.6.6 Uji Parsial ( Uji t )

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol yang diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol. Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen ( Ghozali 2018;99 ). Tujuan dilakukan pengujian ini untuk mengetahui *t-test for equality means*. Dengan keputusan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.6.7 Uji Simultan ( Uji F )

Uji F menguji joint hipotesia bahwa  $X_1, X_2, X_3$  secara bersama-sama sama dengan nol. Uji hipotesia seperti ini secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah berhubungan linier terhadap  $X_1, X_2, X_3$ . Pada dasarnya uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen ( Ghozali 2018;98 ). Pada penelitian ini kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1.  $H_a$  ditolak bila nilai signifikansi  $> \alpha$  ( 0,05 ) artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.  $H_a$  diterima bilai nilai signifikansi  $< \alpha ( 0,05 )$  artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.6.8 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (  $R^2$  ) bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen ( Ghozali 2018:97 ).

Kelemahan penggunaan koefisien determinasi biasanya adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka akan meningkatkan  $R^2$ , tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen ( Ghozali 2018:97 ). Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan agar menggunakan *adjusted*  $R^2$ .



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah ditampilkan pada bab IV, yang sudah diolah melalui SPSS maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa :

1. Variabel waktu penetapan anggaran berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut artinya variabel waktu penetapan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.
2. Variabel *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut artinya variabel *fiscal stress* berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.
3. Variabel sisa anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut artinya variabel sisa anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.
4. Variabel waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut.

Maka dapat dikatakan berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapat pengaruh dari hasil penelitian waktu penetapan anggaran, *fiscal stress* dan sisa anggaran terhadap serapan anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut tahun 2015-2018.

## 5.2 Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai masukan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Sumatera Utara harus memanfaatkan anggaran sehingga terjadinya kemandirian agar tidak terjadi tekanan fiskal yang dapat menyebabkan *fiscal stress*. Pemerintah daerah Sumatera Utara harus memanfaatkan sisa anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan tahun sebelumnya yang belum terlaksana tanpa harus menggunakan anggaran tahun berjalan. Sehingga *project* yang sudah direncanakan pada tahun berjalan dapat terlaksana dengan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pemilik anggaran.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya perlu memperluas objek penelitian seperti sampel dan periode penelitian sehingga jumlah data dan sampel yang digunakan dalam penelitian semakin banyak. Peneliti diharapkan juga memperluas tempat penelitian pada provinsi lain. Dan diharapkan dengan melakukan kajian lebih lanjut dengan menambahkan variabel independent potensial lainnya seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD ), yang berkaitan dengan serapan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Darma. ( 2015 ). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Banda Aceh*. Banda Aceh.
- Abdullah dan Nazry. ( 2014 ). *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris Dari Perspektif Keagaenan*. Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis Vol.4. Banda Aceh.
- Ardhini. ( 2011 ), *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Dalam Perspektif Teori Keagenan ( Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah )*". Skripsi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arif Kurniawan dan Fefri Indra Arza. ( 2019 ). *Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran Dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provisni Sumatera Barat )*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.1 No. 3. Padang.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ). ( 2011 ). *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Paris Review, Yogyakarta.
- Cut dan Iskandar ( 2017 ). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan SILPA Sebagai Variabel Moderating*, Simposium Nasional Akuntansi XX. 2017. Jember
- Dadan dan Indi. ( 2017 ). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran, Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol.10 No.1. Banten.
- Eko Raharjo. ( 2007 ). *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol.2 No.1. Semarang.
- Elypaz, Donald dan Winston. ( 2017 ). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol.8 No.2. Manado.
- Erlina, Ari Syahputra dan Iskandar Muda. ( 2017 ). *The Analysis Of The Influencing Factors Of Budget Absorption*. International Journal Of Economic Research Vol.14 No.12. Sumatera Utara.
- Ghozali. ( 2018 ). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.

- Halim. ( 2014 ). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Havesi A.G. ( 2006 ). *Analysis Of Fiscal Stress In New York State's Cities*. Journal Division Of Local Government Servies & Economic Development. New York.
- Imam Hanif dan Suparno. ( 2017 ). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Fiscal Stress Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.2 No.4. Banda Aceh.
- Junita Afrah. ( 2016 ). *Pengaruh Fiscal Stress Dan Legislature Size Terhadap Expenditure Change Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Jurnal Akuntansi Vol.20 No.3. Jakarta.
- Nellyanti, Darwanis, Abdullah. ( 2016 ). *Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, Dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Belanja Tidak Langsung ( Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh )*. Jurnal Administrasi Akuntansi Vol.5 No.2. Banda Aceh.
- Nofa Sapitri Rezeki. ( 2017 ). *Desentralisasi Fiskal: Studi Tentang Kota Pekanbaru Dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2014*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol.4 No. 1. Riau.
- Rambe, Fadlina Almi M. ( 2018 ). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara,.* Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ruhmaini, Syukriy Abdullah dan Zuraida. ( 2017 ). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPK Di Kabupaten Aceh Tengah*. Banda Aceh.
- Sugiyono. ( 2013 ). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Surbakti, Saiful Bahri. ( 2019 ). *Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa anggaran Tahun Sebelumnya Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.



## LAMPIRAN

## 1. Data Mentah

Tahun 2015

No	Kabupaten	Waktu Penetapan	Fiscal Stress	Sisa Anggaran	Serapan Anggaran
1	Tapanuli Selatan	1	1.11	0.96	1.00
2	Tapanuli Tengah	0	1.37	2.70	1.12
3	Tapanuli Utara	1	1.66	2.54	1.11
4	Toba Samosir	1	0.91	6.53	1.07
5	Binjai	1	0.88	1.87	0.90
6	Medan	1	0.89	0.42	0.87
7	Pematang Siantar	1	0.73	1.60	0.89
8	Sibolga	0	1.00	2.36	0.95
9	Tanjung Balai	1	1.12	3.22	0.94
10	Tebing Tinggi	1	1.23	1.73	1.02
11	Padang Sidempuan	0	1.21	1.71	0.99
12	Pakpak Barat	1	1.06	10.38	0.98
13	Nias Selatan	1	0.41	4.28	0.94
14	Humbang Hasundutan	1	1.27	7.19	1.03
15	Serdang Bedagai	0	1.11	4.02	1.09
16	Samosir	1	1.29	6.28	1.03
17	BatuBara	1	1.19	4.55	1.04
18	Padang Lawas	1	0.87	6.34	0.99
19	Padang Lawas Utara	1	1.00	6.50	1.07
20	Labuhan Batu Selatan	1	0.81	4.54	1.08
21	Labuhan Batu utara	0	1.13	2.05	1.06
22	Nias Utara	1	0.56	9.24	1.05
23	Nias Barat	1	0.72	6.60	0.96
24	Gunung Sitoli	1	0.71	9.12	1.03
25	Mandailing Natal	0	0.97	3.58	1.06
26	Deli Serdang	1	0.82	0.52	0.85
27	Karo	1	1.64	6.03	1.57
28	Langkat	1	1.11	3.64	1.25
29	Simalungun	0	1.00	0.99	0.92
30	Labuhan Batu	1	0.69	0.91	0.90



31	Dairi	1	0.97	2.89	1.03
32	Asahan	0	1.38	3.37	1.13
33	Nias	1	1.12	3.11	1.15

## Tahun 2016

No	Kabupaten	Waktu Penetapan	Fiscal Stress	Sisa Anggaran	Serapan Anggaran
1	Tapanuli Selatan	0	0.85	0.47	0.98
2	Tapanuli Tengah	0	1.12	1.30	0.90
3	Tapanuli Utara	0	1.41	1.26	0.92
4	Toba Samosir	0	1.45	1.98	0.98
5	Binjai	0	1.10	0.53	0.94
6	Medan	0	0.84	0.16	0.80
7	Pematang Siantar	0	0.91	0.72	1.04
8	Sibolga	1	1.05	1.18	0.79
9	Tanjung Balai	0	1.01	1.33	0.91
10	Tebing Tinggi	0	1.09	0.76	0.92
11	Padang Sidempuan	1	1.13	0.58	1.06
12	Pakpak Barat	0	1.23	3.63	0.86
13	Nias Selatan	0	1.15	0.38	0.92
14	Humbang Hasundutan	0	1.20	3.03	0.94
15	Serdang Bedagai	1	1.21	1.21	1.00
16	Samosir	0	1.28	2.68	0.92
17	BatuBara	0	1.18	2.10	1.14
18	Padang Lawas	0	0.79	1.93	0.98
19	Padang Lawas Utara	0	0.95	3.35	0.95
20	Labuhan Batu Selatan	0	1.03	1.25	0.99
21	Labuhan Batu utara	0	1.20	0.72	1.17
22	Nias Utara	1	0.85	2.93	0.84
23	Nias Barat	0	0.65	2.40	0.84
24	Gunung Sitoli	0	1.04	4.45	0.92
25	Mandailing Natal	0	0.82	1.64	0.90
26	Deli Serdang	0	0.85	0.27	0.88
27	Karo	1	1.08	3.37	0.86
28	Langkat	1	1.15	1.99	1.21
29	Simalungun	0	1.10	0.78	1.00

30	Labuhan Batu	0	0.78	0.34	1.00
31	Dairi	0	0.90	1.39	0.95
32	Asahan	1	0.50	3.28	0.93
33	Nias	0	1.19	1.47	0.91

Tahun 2017

No	Kabupaten	Waktu Penetapan	Fiscal Stress	Sisa Anggaran	Serapan Anggaran
1	Tapanuli Selatan	1	1.29	0.52	1.05
2	Tapanuli Tengah	1	1.00	0.95	1.00
3	Tapanuli Utara	0	1.72	0.34	1.02
4	Toba Samosir	1	1.24	1.31	1.01
5	Binjai	1	1.42	0.13	0.96
6	Medan	0	0.88	0.02	0.80
7	Pematang Siantar	1	0.91	1.50	0.82
8	Sibolga	1	1.32	0.22	0.98
9	Tanjung Balai	1	1.00	1.17	0.87
10	Tebing Tinggi	1	1.16	0.12	0.96
11	Padang Sidempuan	0	1.20	0.05	1.07
12	Pakpak Barat	1	1.21	0.97	0.75
13	Nias Selatan	1	1.30	3.67	0.98
14	Humbang Hasundutan	1	2.05	1.61	0.97
15	Serdang Bedagai	0	1.01	0.93	1.00
16	Samosir	1	1.44	1.02	0.91
17	BatuBara	1	1.30	1.34	1.00
18	Padang Lawas	1	0.89	2.27	0.93
19	Padang Lawas Utara	0	2.12	1.49	0.95
20	Labuhan Batu Selatan	1	2.06	0.79	0.99
21	Labuhan Batu utara	0	1.22	0.59	1.24
22	Nias Utara	1	0.63	2.25	0.89
23	Nias Barat	1	1.26	0.25	0.99
24	Gunung Sitoli	0	0.85	4.37	0.96
25	Mandailing Natal	1	0.80	1.01	0.98
26	Deli Serdang	1	1.28	0.30	0.95
27	Karo	0	1.52	2.04	1.00
28	Langkat	1	1.07	1.02	1.03
29	Simalungun	1	1.18	0.48	1.00
30	Labuhan Batu	1	0.76	0.97	0.86

31	Dairi	0	1.94	1.10	1.01
32	Asahan	1	1.15	2.12	0.96
33	Nias	0	1.24	1.48	0.99

Tahun 2018

No	Kabupaten	Waktu Penetapan	Fiscal Stress	Sisa Anggaran	Serapan Anggaran
1	Tapanuli Selatan	1	1.27	0.62	1.09
2	Tapanuli Tengah	1	0.77	0.50	1.00
3	Tapanuli Utara	0	0.96	0.57	0.96
4	Toba Samosir	0	1.04	2.09	0.93
5	Binjai	0	1.00	0.34	0.94
6	Medan	0	0.77	0.03	0.78
7	Pematang Siantar	0	1.07	0.62	0.98
8	Sibolga	0	0.75	0.42	0.94
9	Tanjung Balai	1	1.08	0.46	0.76
10	Tebing Tinggi	0	1.08	0.23	0.91
11	Padang Sidempuan	0	0.80	0.33	0.96
12	Pakpak Barat	0	0.71	1.70	0.87
13	Nias Selatan	1	0.93	6.23	0.94
14	Humbang Hasundutan	0	1.50	1.37	0.96
15	Serdang Bedagai	0	0.89	0.46	1.01
16	Samosir	0	0.87	0.67	0.96
17	BatuBara	1	1.02	1.34	0.98
18	Padang Lawas	0	0.80	2.03	0.92
19	Padang Lawas Utara	0	1.48	0.53	0.95
20	Labuhan Batu Selatan	0	0.91	0.69	0.95
21	Labuhan Batu utara	0	1.12	1.63	1.19
22	Nias Utara	1	0.70	0.26	0.93
23	Nias Barat	0	0.80	0.47	1.01
24	Gunung Sitoli	0	0.80	1.48	0.80
25	Mandailing Natal	0	0.72	0.56	0.98
26	Deli Serdang	1	0.73	0.27	0.89
27	Karo	0	1.08	1.60	1.06
28	Langkat	1	0.95	0.95	1.22

29	Simalungun	1	0.25	0.13	0.69
30	Labuhan Batu	1	0.90	0.11	0.88
31	Dairi	0	0.73	1.65	0.94
32	Asahan	0	1.17	0.60	1.01
33	Nias	1	1.09	1.43	1.01



## 2. Teknik Analisis Data

### Pengujian Asumsi Klasik

#### I. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		132	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.09802460	
Most Extreme Differences	Absolute	.076	
	Positive	.076	
	Negative	-.048	
Test Statistic		.076	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.409 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.396
		Upper Bound	.422

a. Test distribution is Normal.

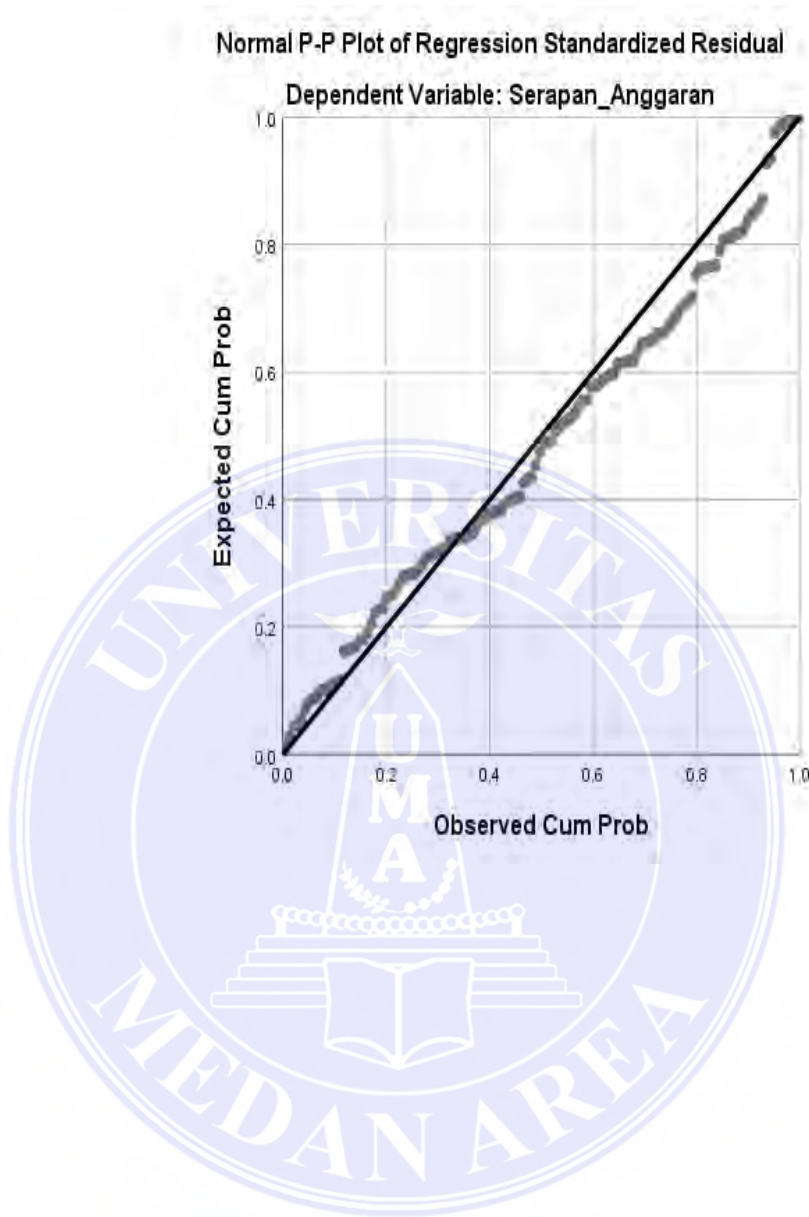
b. Calculated from data.

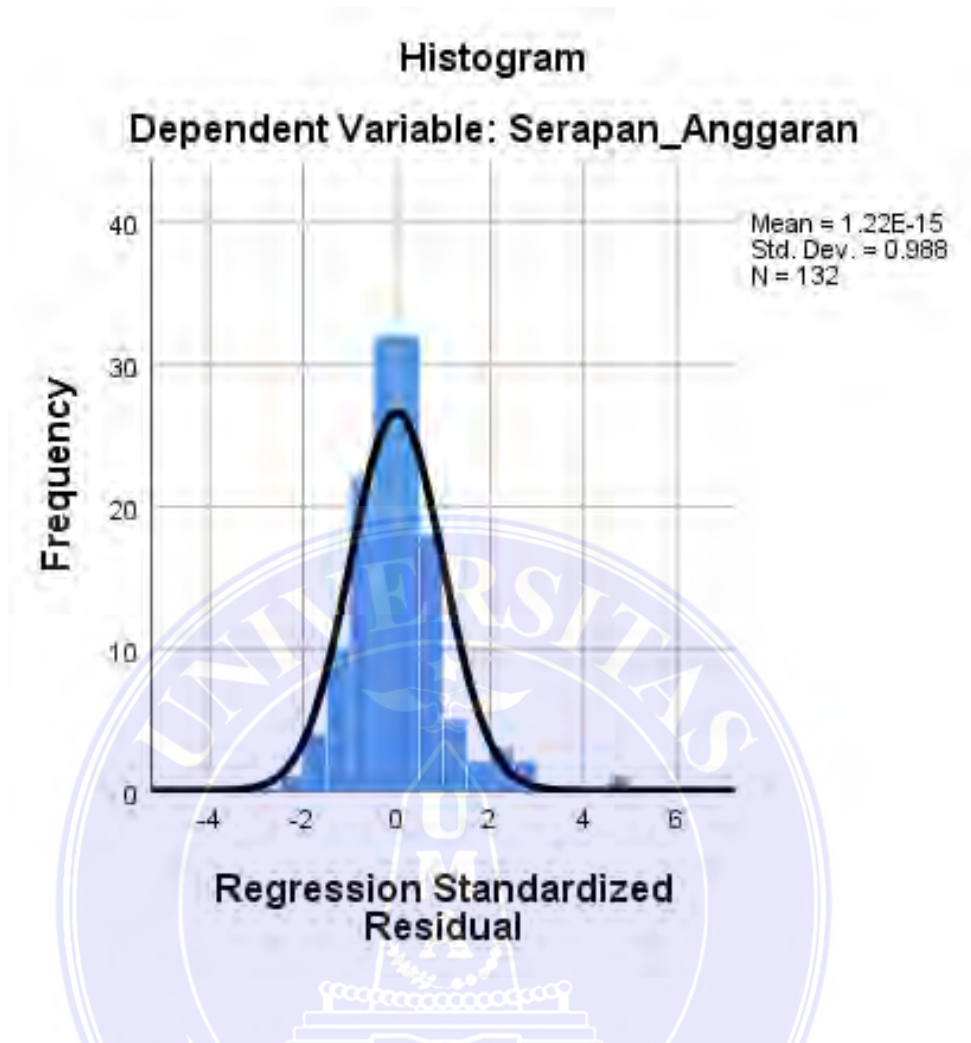
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



### Grafik Plot





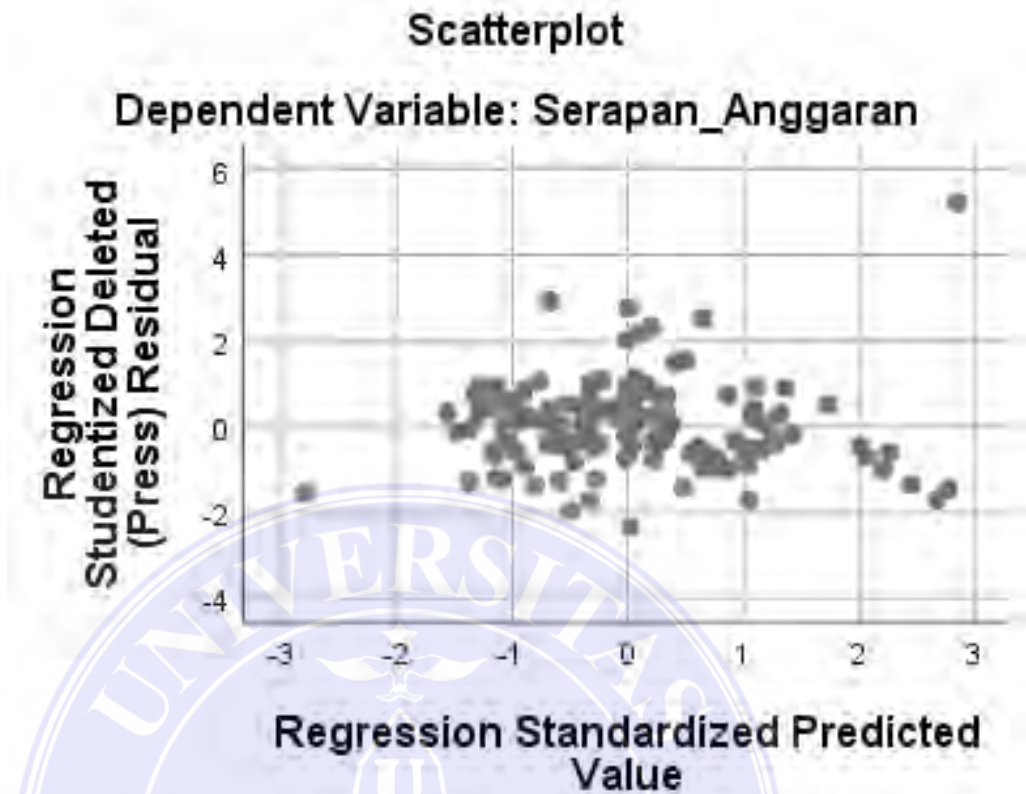
## II. Uji Multikolonieritas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	(Constant)	.805	.034		23.559	.000	
	Waktu_Penapan	-.004	.018	-.019	-.238	.812	.929 1.077
	Fiscal_Stress	.131	.029	.363	4.585	.000	.993 1.007
	Sisa_Anggaran	.017	.004	.305	3.721	.000	.925 1.081

a. Dependent Variable: Serapan\_Anggaran

## III. Uji Heteroskedastisitas



**IV. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.453 <sup>a</sup>	.205	.187	.09917	1.930

a. Predictors: (Constant), Sisa\_Anggaran, Fiscal\_Stress, Waktu\_Penetapan

b. Dependent Variable: Serapan\_Anggaran

### 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.805	.034		23.559	.000
	Waktu_Penetapan	-.004	.018	-.019	-.238	.812
	Fiscal_Stress	.131	.029	.363	4.585	.000
	Sisa_Anggaran	.017	.004	.305	3.721	.000

a. Dependent Variable: Serapan\_Anggaran

## 4. Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial ( Uji t )

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.805	.034		23.559	.000
	Waktu_Penetapan	-.004	.018	-.019	-.238	.812
	Fiscal_Stress	.131	.029	.363	4.585	.000
	Sisa_Anggaran	.017	.004	.305	3.721	.000

a. Dependent Variable: Serapan\_Anggaran

### b. Uji Simultan ( Uji F )

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.325	3	.108	11.014	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1.259	128	.010		
	Total	1.584	131			

a. Dependent Variable: Serapan\_Anggaran

b. Predictors: (Constant), Sisa\_Anggaran, Fiscal\_Stress, Waktu\_Penetapan



**c. Koefisien determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.453 <sup>a</sup>	.205	.187	.09917

a. Predictors: (Constant), Sisa\_Anggaran, Fiscal\_Stress, Waktu\_Penetapan

